

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan berbagai aktivitas ekonomi baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi wilayah pada suatu daerah. Kenaikan tingkat produksi riil dan meningkatnya taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Namun dalam proses perkembangan wilayah ada sektor yang perkembangan ekonomi wilayah relatif cepat dan ada sektor yang perkembangannya relatif lambat sehingga menyebabkan munculnya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar bidang.

Adanya ketimpangan pembangunan antar sektor ternyata juga berdampak pada terjadinya ketimpangan antar wilayah. Salah satu dampak dari terjadinya ketimpangan ekonomi tersebut adalah terjadinya migrasi penduduk dari daerah rural ke daerah urban (urbanisasi). Akibatnya seringkali potensi-potensi ekonomi yang terdapat di wilayah pedesaan tidak dimanfaatkan dengan optimal karena keterbatasan sumberdaya manusia. Rendahnya daya tarik untuk bermukim di daerah pedesaan merupakan penyebab utama terjadinya urbanisasi secara terus-menerus.

Jika ditinjau secara lebih mendalam maka terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketertinggalan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. Beberapa diantaranya adalah nilai tukar komoditas pertanian yang rendah dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, jaringan komunikasi dan akses informasi yang terbatas dan kemampuan wirausaha yang lemah. Faktor penyebab lain adalah adanya

persepsi bahwa usaha bisnis skala mikro kurang menguntungkan, kurangnya memperhatikan potensi daerah dan beberapa sebab lain yang menjadikan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan menjadi tertinggal.

Salah satu contoh dari bentuk ketertinggalan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan adalah kurang berkembangnya industri gula kelapa yang banyak diusahakan oleh masyarakat pedesaan. Industri gula kelapa merupakan salah satu industri pengolahan hasil pertanian yang banyak diusahakan dalam skala kecil di daerah pedesaan, disamping usaha pembuatan tahu tempe dan makanan lainnya.

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang cukup potensial bagi pengembangan gula kelapa. Bahan baku gula kelapa yaitu nira yang didapatkan dari tanaman kelapa. Luas tanaman kelapa di Kabupaten Banyumas tercatat seluas 15.848 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 1.981.016 pohon. Dari sejumlah luas areal tanaman tersebut, luas areal tanaman kelapa yang digunakan sebagai kelapa deres adalah 5.167 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 645.865 pohon. Dari jumlah tersebut mampu menghasilkan produksi gula kelapa kurang lebih 49.608.53 ton/tahun. Jumlah pengrajin gula kelapa dan pengrajin gula kelapa di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 28.571 orang yang tersebar dalam 217 kelompok tani di 23 Kecamatan (Dinperindagkop Kabupaten Banyumas, 2010).

Dari gambaran singkat di atas dapat diambil kesimpulan awal bahwa Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan industri gula kelapa. Oleh karena itu kebijakan pengembangan industri kecil perlu diarahkan agar benar-benar mampu menerapkan manajemen yang efisien, produktif, transparan dan profesional yang dilandasi oleh jiwa, semangat, nilai dan

prinsip koperasi. Dengan arah seperti ini industri kecil akan mampu menjadi wadah ekonomi yang mantap, otonom dan kompetitif.

Selama ini banyak kalangan yang berusaha membantu, membina dan mengembangkan para pengusaha kecil, namun hasilnya belum memenuhi seperti apa yang diharapkan. Pada dasarnya upaya pembinaan pengusaha kecil dimaksudkan untuk mewujudkan usaha kecil yang efisien sehat dan tangguh yang pada gilirannya dapat berperan secara optimal dalam mendorong proses pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta adanya iklim usaha yang kondusif yakni berupa kesempatan atau peluang usaha yang adil, pemberian kemudahan, kepastian usaha, persaingan yang sehat dan kebijakan insentif ekonomi serta perlindungan yang wajar.

Strategi umum pengembangan pengusaha kecil pada hakekatnya diarahkan untuk menumbuhkan tatanan ekonomi yang berlandaskan pada azas kekeluargaan, yang dihimpun dalam kesatuan sistem yang serasi, saling mengisi dan saling mendukung serta menumbuhkan keberhasilan yang sinergik menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Dalam tataran yang lebih nyata perlu didirikan suatu badan usaha yang mampu mengkoordinasikan pemanfaatan bahan baku yang tersedia untuk menghasilkan gula kelapa yang memiliki standar kualitas tertentu melalui proses produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pengembangan usaha gula kelapa diantaranya adalah *pertama*, prospek pemasaran produk gula kelapa di masa mendatang sangat potensial baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). *Kedua*, industri pembuatan gula kelapa melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pemberdayaan pengusaha kecil industri gula kelapa akan berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil khususnya

yang berkaitan dengan usaha gula kelapa (pengrajin gula kelapa, petani, pembuat gula, dan pedagang).

Kualitas gula kelapa yang dihasilkan dari Kabupaten Banyumas merupakan produk gula kelapa terbaik apabila dibandingkan dengan gula kelapa dari daerah lain. Pendapat ini terbukti dari rasa, aroma, bentuk yang banyak disukai oleh konsumen dari luar daerah. Namun demikian kualitas gula yang dihasilkan antara satu pengusaha dengan pengusaha lain masih terdapat perbedaan atau belum terdapat keseragaman kualitas gula yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengarahkan pengusaha gula kelapa untuk menghasilkan gula kelapa yang memenuhi standar tertentu.

Secara umum ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pengusaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemasaran adalah terdapat persaingan pasar yang kurang sehat khususnya antara pedagang besar (pedagang pengumpul) dan pedagang pengecer, tidak adanya kesepakatan harga dasar dan harga atas, menyebabkan perkembangan harga produk gula kelapa tidak dapat dikontrol. Di samping itu munculnya produk “*gula gemblung*” (gula campuran) dan adanya gula dari daerah lain yang mutunya lebih rendah masuk ke daerah Banyumas, sehingga menyebabkan harga gula menjadi jatuh. Kondisi tersebut tentunya akan merugikan pengusaha gula kelapa yang menjual produknya dengan mutu dan kualitas baik. Untuk itu diperlukan adanya standar mutu pengolahan gula kelapa yang baik.

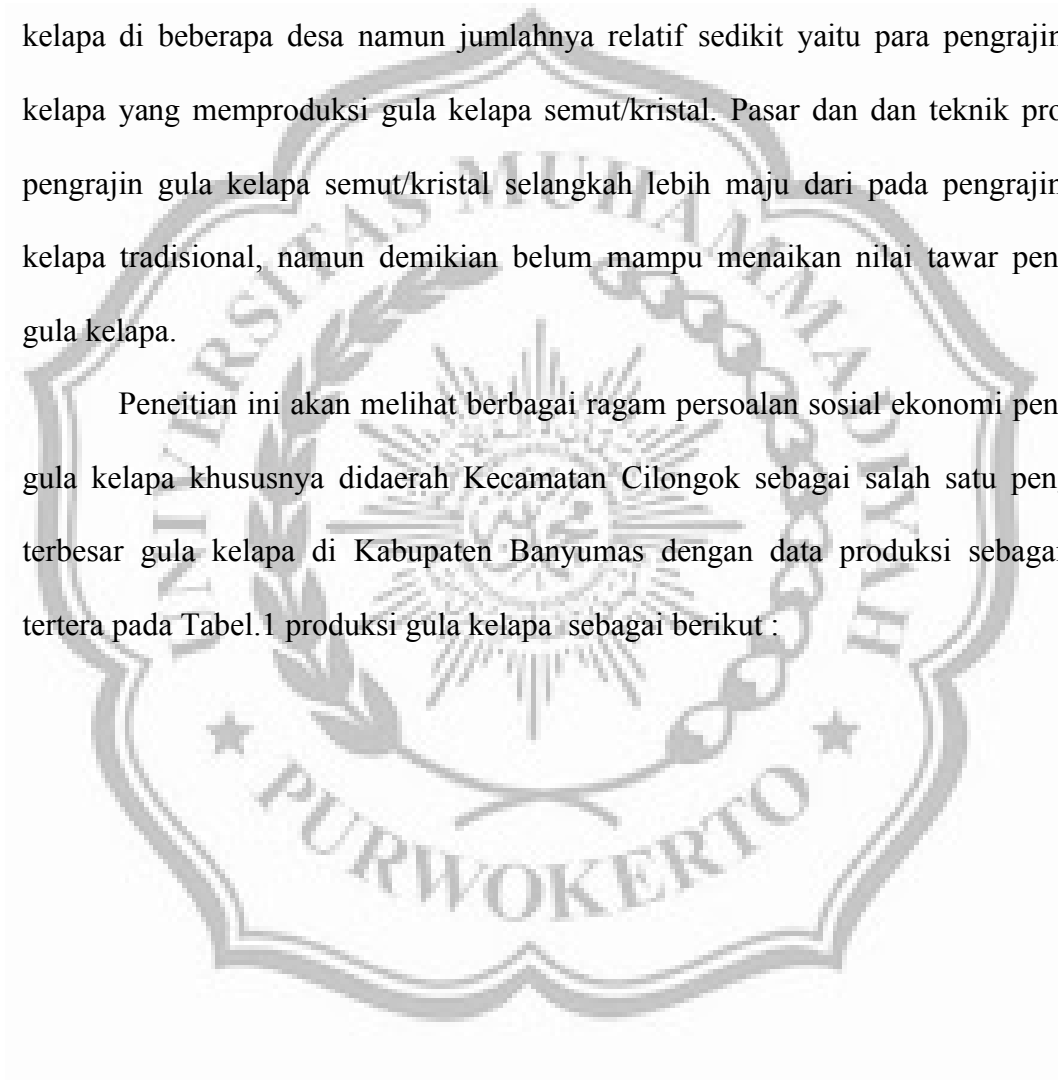
Permasalahan lainnya adalah adanya beberapa pengusaha gula kelapa yang menjual produknya ke daerah lain, tetapi kemudian oleh pembelinya produk gula kelapa tersebut diberi merek tersendiri. Hal ini jelas merugikan pengusaha gula kelapa

yang berada di daerah Banyumas, karena produknya diklaim oleh pihak lain sebagai hasil produksinya.

Kondisi agroindustri gula kelapa di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas secara umum belum menunjukkan kondisi ideal yang diinginkan pengrajin gula kelapa. Besaran harga yang diterima oleh pengrajin gula kelapa belum sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pengrajin gula kelapa, sehingga secara ekonomi belum dapat menopang kebutuhan hidup keluarga pengrajin gula kelapa.

Terdapat sedikit pergeseran orientasi pasar maupun teknik produksi gula kelapa di beberapa desa namun jumlahnya relatif sedikit yaitu para pengrajin gula kelapa yang memproduksi gula kelapa semut/kristal. Pasar dan teknik produksi pengrajin gula kelapa semut/kristal selangkah lebih maju dari pada pengrajin gula kelapa tradisional, namun demikian belum mampu menaikan nilai tawar pengrajin gula kelapa.

Peneitian ini akan melihat berbagai ragam persoalan sosial ekonomi pengrajin gula kelapa khususnya didaerah Kecamatan Cilongok sebagai salah satu penghasil terbesar gula kelapa di Kabupaten Banyumas dengan data produksi sebagaimana tertera pada Tabel.1 produksi gula kelapa sebagai berikut :



Tabel 1. Nama Desa, Jumlah Pengrajin Gula Kelapa, Jumlah Pohon dan Jumlah Produksi

NO	NAMA DESA	JML PENGRAJIN GULA KELAPA (orang)	JML POHON (pohon)	JML PRODUKSI (kg/hari)
1	Langgongsari	413	10.329	3.718,44
2	Pageraji	889	20.568	7.404,48
3	Cilongok	373	10.258	3.692,88
4	Pernasidi	252	6.544	2.355,84
5	Karanglo	21	945	340,20
6	Kalisari	15	366	131,76
7	Karantengah	116	2.585	930,60
8	Panembangan	108	2.462	886,32
9	Rancamaya	311	4.190	1.508,40
10	Gunung Lurah	318	8.615	3.101,40
11	Sokawera	498	11.596	4.174,56
12	Sambirata	258	6.770	2.437,20
13	Kasegeran	460	13.083	4.709,88
14	Sudimara	379	9.067	3.264,12
15	Jatisaba	465	7.803	2.809,08
16	Panusupan	678	10.942	3.939,12
17	Cipete	152	2.756	992,16
18	Batuanten	515	2.192	789,12
19	Cikidang	117	2.192	789,12
20	Pejogol	174	2.748	989,28
	JUMLAH	6.512	136.011	48.964

Sumber: Kantor Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2012

B. Perumusan Masalah

1. Permasalahan sosial ekonomi apa sajakah yang dihadapi pengrajin gula kelapa di Kecamatan Cilongok?
2. Bagaimanakah pengrajin gula kelapa di Kecamatan Cilongok menyelesaikan ragam persoalan sosial ekonomi tersebut?

C. Pembatasan masalah

Mengingat akan keterbatasan waktu dan biaya serta untuk lebih terfokusnya pembahasan sehingga diharapkan hasil yang optimal dari penelitian ini, maka dilakukan pembatasan-pembatasan permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di ruang lingkup daerah pedesaan sentra gula kelapa di Kecamatan Cilongok.

2. Kegiatan penelitian hanya mencakup aspek sosial ekonomi pengrajin gula kelapa.
3. Permasalahan diluar penelitian ini dianggap tidak terpengaruh terhadap industri gula kelapa di Kecamatan Cilongok.

D. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi pengrajin gula kelapa di Kecamatan Cilongok.
- b. Cara penyelesaian ragam persoalan sosial ekonomi yang dihadapi pengrajin gula kelapa di Kecamatan Cilongok.

2. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman dalam mengaplikasikan materi mata kuliah yang didapatkan di bangku kuliah.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, sebagai sumber informasi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama
3. Bagi pengrajin gula kelapa untuk mendapatkan acuan guna pemberdayaan pengrajin gula kelapa.
4. Bagi pengambil kebijakan untuk dasar pengambilan kebijakan dibidang pemberdayaa pengrajin gula kelapa.